

Erosi Kearifan Lokal dalam Komunikasi Mitigasi Bencana: Studi pada Generasi Muda Mandar di Majene

Dewi Nuraliah^{1*}, Rezki Rahmawati²

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat

Corresponding Author's : dewi.nuraliah@unsulbar.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3914 - 3929

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4126>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4126>

Article History:

Received: 27-08-2026

Revised: 23-10-2026

Accepted: 27-10-2026

Abstract : Prior research on local wisdom and disaster mitigation has largely remained descriptive and rarely analyzed from a communication-science perspective. This study addresses that gap by examining the erosion of local wisdom in disaster mitigation communication among young Mandar people in Majene Regency, an active-subduction-zone area with a history of major seismic loss. Using a qualitative phenomenological design, data were collected through in-depth interviews with thirteen purposively selected informants across three sub-regions, complemented by observation and document analysis, and analyzed thematically. Findings show erosion is not the disappearance of local knowledge but a gradual reconfiguration of communication actors, channels, and meanings: authority shifts from traditional elders (Tomatua) toward digital and institutional sources, oral transmission gives way to digital channels, and inherited terms and rituals persist even as their meaning is reinterpreted. Topography-based evacuation is the most consistently transmitted element, while richer vocabulary and rituals survive unevenly across sub-regions. Beyond Diffusion of Innovations, Media System Dependency Theory, Narrative Paradigm, and Social Amplification of Risk Framework, findings are read critically as a contestation over epistemic authority between local and institutional knowledge, yielding a revitalization strategy anchoring evacuation knowledge to local meaning, documenting local terms officially, and positioning traditional figures as communicators.

Keywords : local wisdom; disaster mitigation communication; knowledge transmission; young generation; risk communication

Abstrak : Kajian terdahulu mengenai kearifan lokal dan mitigasi bencana sebagian besar masih deskriptif dan jarang dibaca dari perspektif Ilmu Komunikasi; penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji erosi kearifan lokal dalam komunikasi mitigasi bencana pada generasi muda Mandar di Kabupaten Majene, wilayah pada zona subduksi aktif dengan riwayat kerugian besar akibat gempa bumi. Penelitian menggunakan desain kualitatif fenomenologi dengan wawancara mendalam terhadap 13 informan purposif pada tiga sub-wilayah, dilengkapi observasi dan analisis dokumen, serta dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi bukan sekadar hilangnya pengetahuan, melainkan pergeseran bertahap pada aktor, kanal, dan makna komunikasi: otoritas bergeser dari Tomatua menuju sumber digital-institusional, transmisi lisan bergeser ke kanal digital, sementara istilah dan ritual tetap dijalankan namun dimaknai ulang. Pola evakuasi berbasis topografi menjadi elemen dengan daya transmisi paling kuat, sementara kekayaan kosakata dan ritual bertahan tidak merata antarwilayah. Selain melalui Diffusion of Innovations, Media System Dependency Theory, Narrative Paradigm, dan Social Amplification of Risk Framework, temuan juga dibaca kritis sebagai kontestasi otoritas epistemik antara pengetahuan lokal dan institusional, menghasilkan strategi revitalisasi yang menautkan pengetahuan

evakuasi dengan makna lokal, mendokumentasikan istilah lokal secara resmi, dan memposisikan tokoh adat sebagai mitra komunikator.

Kata Kunci : kearifan lokal; komunikasi mitigasi bencana; transmisi pengetahuan; generasi muda; komunikasi risiko

PENDAHULUAN

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berada pada zona subduksi aktif Makassar Strait Thrust yang menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan seismik tertinggi di Indonesia. Sejarah kebencanaan wilayah ini bersifat siklis: gempa berkekuatan 7,0 Mw pada tahun 1969 memicu tsunami dengan *run-up* hingga 4 meter, sementara gempa 6,2 Mw pada 15 Januari 2021 mengakibatkan sedikitnya 81 korban jiwa, kerusakan lebih dari 7.800 unit rumah, dan pengungsian sekitar 37.000 jiwa, dengan total kerugian ekonomi mencapai Rp829,1 miliar di Kabupaten Mamuju dan Majene (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021b, 2021a). Pola kejadian yang berulang ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem komunikasi risiko berbasis budaya bukan sekadar warisan kultural, melainkan agenda komunikasi mitigasi jangka panjang yang mendesak untuk dijaga.

Jauh sebelum berkembangnya sistem komunikasi kebencanaan modern, masyarakat Mandar di Majene telah membangun mekanisme komunikasi mitigasi bencana yang berakar pada kearifan lokal dan diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini berfungsi sebagai media komunikasi risiko yang mentransmisikan pengetahuan mitigasi melalui berbagai saluran komunikasi yang saling melengkapi, meliputi penggunaan bahasa lokal seperti istilah "*linor/lino*" untuk menyebut gempa bumi, pembacaan tanda-tanda alam sebagai simbol nonverbal, narasi lisan antargenerasi, praktik ritual seperti "*tolak bala*", hingga komunikasi struktural yang tercermin dalam arsitektur rumah adat "*Banua Kayyang*" (Rahmawati et al., 2026). Melalui beragam kanal tersebut, pesan-pesan mitigasi dikomunikasikan secara kontekstual sehingga mudah dipahami dan diinternalisasi oleh komunitas. Pola komunikasi berbasis kearifan lokal ini juga ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti narasi *Smong* pada masyarakat Simeulue yang berkontribusi terhadap keselamatan warga saat tsunami 2004, serta praktik komunikasi mitigasi berbasis budaya di Pangandaran (Damayani et al., 2022), Tiworo (Marhadi et al., 2024), Maluku Barat Daya (Pakniyany et al., 2022), dan Aceh (Fajri et al., 2024; Fakhruddin & Elmada, 2022). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun komunikasi mitigasi bencana yang adaptif dan berkelanjutan.

Namun, keberlanjutan sistem komunikasi berbasis kearifan lokal tersebut kini menghadapi tantangan serius di era digital. Sejumlah kajian menunjukkan kecenderungan memudarnya pengetahuan lokal akibat lemahnya proses transmisi antargenerasi, fenomena yang dalam literatur komunikasi risiko dikenal sebagai *retention gap*, seiring perkembangan teknologi digital dan media sosial yang secara signifikan mengubah kanal serta pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda (Carley et al., 2016; Rizal et al., 2025). Pada konteks Indonesia, paparan komunikasi digital pada generasi muda terbukti berpengaruh besar terhadap persepsi risiko, tetapi hubungan tersebut sepenuhnya dimediasi oleh persepsi risiko dan tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan aktual (Hesti et al., 2025), sementara studi lain menunjukkan tingkat pengetahuan kearifan lokal mitigasi bencana tergolong rendah pada mayoritas generasi Z di Aceh (Gadeng et al., 2024). Pola-pola ini mengindikasikan adanya disrupsi dalam sistem komunikasi mitigasi bencana, khususnya pada proses transmisi, reproduksi, dan legitimasi pengetahuan lokal: kanal tradisional seperti narasi lisan, simbol budaya, dan praktik ritual berangsur tergantikan oleh

media digital dan komunikasi institusional yang cenderung satu arah dan kurang kontekstual, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan makna (*meaning gap*) antara pesan mitigasi yang disampaikan dan pemahaman generasi muda terhadapnya.

Dengan demikian, erosi kearifan lokal tidak dapat dipahami semata sebagai hilangnya tradisi, melainkan sebagai kegagalan dalam sistem komunikasi budaya untuk mentransmisikan pengetahuan mitigasi secara berkelanjutan antargenerasi. Pada konteks ini, turut berlangsung kontestasi pengetahuan (*knowledge contestation*) antara sistem pengetahuan lokal dan pengetahuan modern yang dilegitimasi institusi formal, yang pada gilirannya membentuk relasi kuasa dalam menentukan pengetahuan mana yang dianggap valid dan layak dijadikan rujukan mitigasi; persoalan ini secara inheren bersifat komunikasional, bukan sekadar kultural.

Kendati urgensi tersebut telah mendorong berkembangnya kajian mengenai kearifan lokal dalam mitigasi bencana secara pesat, celah penelitian yang belum banyak dikaji terletak pada tiga aspek (deskriptif, disipliner, dan keterpisahan kajian digital-kearifan lokal). Pertama, secara substansi, mayoritas kajian terdahulu cenderung berfokus pada dokumentasi normatif-deskriptif. Hal ini mencakup penelitian pendahulu di Majene yang lebih menitikberatkan pada inventarisasi nilai dan identifikasi awal bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana secara konvensional (Rahmawati *et al.*, 2026). Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berada pada level multidisipliner dari yang hanya sekedar melakukan pendataan kearifan lokal yang ada, melainkan merumuskan model revitalisasi konkret yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan platform digital modern. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah yang memisahkan antara teknologi digital dan nilai kearifan lokal yang belum tersentuh pada studi sebelumnya, serta menawarkan kebaruan berupa strategi implementasi mitigasi bencana berbasis digital yang kontekstual di wilayah Majene.

Studi pada komunitas Pangandaran (Damayani *et al.*, 2022; Rizal *et al.*, 2025), Tiworo (Marhadi *et al.*, 2024), Maluku Barat Daya (Pakniyany *et al.*, 2022), dan Aceh (Fajri *et al.*, 2024; Fakhruddin & Elmada, 2022) masih berhenti pada level deskriptif-identifikasi: mendata bentuk, istilah, atau fungsi kearifan lokal, tanpa membedah proses komunikasi yang menyebabkan bentuk tersebut bertahan atau justru terkikis antargenerasi. Kedua, secara disipliner, sebagian besar riset di atas dikaji dari sudut pandang mitigasi bencana, geografi, atau manajemen risiko, sementara pembacaan dari perspektif Ilmu Komunikasi, yang semestinya menjadi disiplin inti untuk membedah pergeseran aktor (siapa yang berbicara dan memiliki otoritas), kanal (melalui apa pesan disampaikan), dan pesan (apa yang dimaknai serta bagaimana maknanya berubah), relatif belum banyak digunakan secara eksplisit dan mendalam. Ketiga, kajian mengenai paparan digital dan persepsi risiko generasi muda (Gadeng *et al.*, 2024; Hesti *et al.*, 2025) umumnya berdiri terpisah dari kajian kearifan lokal, sehingga belum menjembatani secara langsung bagaimana pergeseran kanal digital berinteraksi dengan proses transmisi narasi dan makna budaya lintas generasi. Ketiga celah inilah yang menjadi pijakan bagi kebaruan penelitian ini.

Penelitian ini diposisikan untuk mengisi ketiga celah tersebut sekaligus, dengan tiga kebaruan utama. Pertama, erosi kearifan lokal diposisikan sebagai kegagalan sistem komunikasi budaya dan sebagai kontestasi legitimasi pengetahuan, bukan semata-mata sebagai hilangnya tradisi. Kedua, penelitian ini berfokus pada generasi muda Mandar sebagai aktor sentral dalam transformasi komunikasi mitigasi, dengan membedah secara eksplisit pergeseran aktor, kanal, dan pesan menggunakan kerangka Ilmu Komunikasi. Ketiga, penelitian ini menawarkan strategi revitalisasi berbasis elemen kearifan lokal yang masih memiliki daya transmisi, sehingga kontekstual dan adaptif terhadap perubahan ekosistem komunikasi digital. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bagi Ilmu Komunikasi terletak pada penempatan erosi kearifan

lokal sebagai objek kajian komunikasi risiko dan komunikasi antargenerasi, alih-alih sekadar objek kajian kebudayaan atau kebencanaan semata.

Selanjutnya, untuk memahami disrupsi komunikasi mitigasi bencana tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan sejumlah perspektif komunikasi yang memiliki fungsi analitis yang saling melengkapi dalam menjelaskan perubahan aktor, kanal, dan pesan komunikasi. Perspektif *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003) digunakan untuk menjelaskan proses masuknya inovasi komunikasi ke dalam sistem sosial, termasuk bagaimana kanal dan praktik komunikasi baru menggantikan mekanisme tradisional melalui peran *opinion leader* dan *change agent*. Sementara itu, *Media System Dependency Theory* (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976) memberikan landasan untuk memahami meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem media, terutama ketika berada dalam situasi ancaman atau perubahan sosial yang berlangsung cepat. Pada dimensi konstruksi makna, *Narrative Paradigm* (Fisher, 1984) memandang manusia sebagai *homo narrans* yang membangun pemahaman terhadap realitas melalui narasi, sehingga efektivitas suatu pesan ditentukan oleh koherensi dan *narrative fidelity* yang dimilikinya. Adapun *Social Amplification of Risk Framework* (Kasperson et al., 1988) digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi mengenai risiko dapat mengalami penguatan maupun pelemahan ketika dimediasi oleh proses sosial dan media.

Keempat perspektif tersebut diposisikan sebagai kerangka analitis fungsional yang kemudian diperkaya dengan perspektif transmisi budaya (Cavalli-Sforza et al., 1982) untuk menelaah kepadatan serta pola pewarisan pengetahuan antargenerasi. Selanjutnya, keseluruhan kerangka tersebut dibaca melalui perspektif komunikasi kritis guna mengidentifikasi relasi kuasa, proses legitimasi pengetahuan, dan dinamika yang memengaruhi keberlangsungan kearifan lokal dalam sistem komunikasi mitigasi bencana. Dengan demikian, analisis penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana komunikasi berfungsi atau mengalami disfungsi, tetapi juga menelaah dimensi sosial-politik yang membentuk perubahan tersebut.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana perubahan proses komunikasi dan transmisi pengetahuan memengaruhi terjadinya erosi kearifan lokal mitigasi bencana pada generasi muda Mandar di Kabupaten Majene? Kedua, elemen-elemen kearifan lokal Mandar apa yang masih memiliki daya transmisi dalam komunikasi antargenerasi serta bagaimana elemen tersebut dapat direvitalisasi sebagai fondasi komunikasi mitigasi bencana yang tetap kontekstual di tengah perubahan media dan sosial? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan proses komunikasi dalam transmisi kearifan lokal mitigasi bencana pada generasi muda Mandar, mengidentifikasi unsur-unsur kearifan lokal yang masih bertahan dalam proses pewarisan antargenerasi, serta merumuskan strategi revitalisasi komunikasi mitigasi berbasis kearifan lokal yang adaptif terhadap perkembangan media digital dan dinamika sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pemaknaan subjek penelitian terhadap perubahan komunikasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Penelitian dilaksanakan di tiga sub-wilayah Kabupaten Majene yang mewakili karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, yaitu Sendana/Somba, Tanjung Batu (kota Majene), dan Malunda/Desa Lombang Timur.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 13 informan yang terbagi ke dalam tiga kelompok kategori, yaitu generasi muda Mandar berusia 18–30 tahun, generasi tua atau tokoh adat, serta pemangku kepentingan kelembagaan dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene pada jenjang staf teknis maupun pimpinan. Distribusi 13 informan tersebut meliputi 5 orang generasi muda, 5 orang generasi tua atau tokoh adat, dan 3 orang perwakilan dari BPBD Kabupaten Majene. Agar mendapatkan variasi pola transmisi pengetahuan lokal antardaerah serta menjamin saturasi data, sebaran 10 informan masyarakat didistribusikan secara spesifik di tiga sub-wilayah, meliputi: Sub-wilayah A sebanyak 4 informan (2 muda, 2 tua), Sub-wilayah B sebanyak 4 informan (2 muda, 2 tua), dan Sub-wilayah C sebanyak 2 informan (1 muda, 1 tua). Sementara itu, 3 informan dari instansi BPBD (1 pimpinan dan 2 staf teknis) diwawancarai untuk memetakan ranah kebijakan serta koordinasi teknis di tingkat kabupaten. Informan generasi muda mencakup individu dengan variasi latar belakang pendidikan, pengalaman merantau, serta keterlibatan pada organisasi kebencanaan, sementara informan generasi tua mencakup tokoh adat (Tomatua) yang masih memimpin ritual adat maupun warga senior tanpa peran adat formal. Sebaran informan pada tiga sub-wilayah tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan variasi pola transmisi pengetahuan lokal antardaerah serta memastikan keterwakilan data dalam analisis penelitian ini.

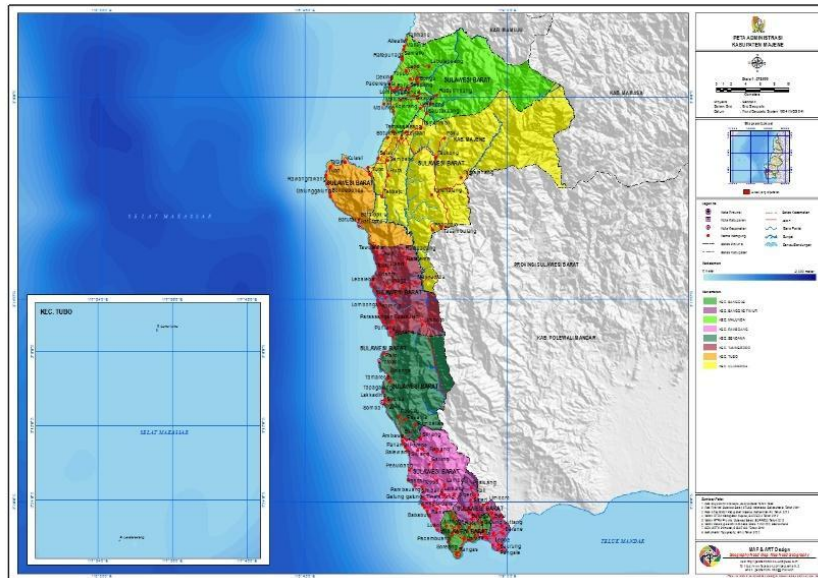
Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi partisipatif, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen kebencanaan resmi, meliputi data kerusakan dan kerugian pascagempa Majene–Mamuju 2021, profil wilayah Kabupaten Majene, serta artikel ilmiah terkait kearifan lokal dan komunikasi mitigasi bencana. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik terintegrasi yang mengadaptasi enam fase analisis tematik Braun dan Clarke (2006) yakni pengenalan data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan, sebagai metode yang lazim digunakan dalam penelitian komunikasi kualitatif untuk membedah pola aktor, kanal, dan pesan secara sistematis. Proses tersebut berlangsung dalam tiga tahap substantif: (1) identifikasi perubahan pada aktor, kanal, dan makna dalam sistem komunikasi mitigasi; (2) identifikasi elemen kearifan lokal yang masih memiliki daya transmisi lintas informan; dan (3) perumusan arah strategi revitalisasi komunikasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan pernyataan antarkategori informan (generasi muda, generasi tua, dan kelembagaan) serta antarsub-wilayah, sehingga temuan yang dilaporkan merupakan pola yang dikonfirmasi oleh lebih dari satu sumber data, bukan semata-mata pernyataan tunggal seorang informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Wilayah Penelitian

Kabupaten Majene memiliki luas wilayah 947,84 km² atau sekitar 5,6% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat, terbagi ke dalam delapan kecamatan dengan topografi yang didominasi perbukitan dan pegunungan, kecuali Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang relatif lebih datar (Pemerintah Kabupaten Majene, n.d.). Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Kabupaten Majene pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 188.780 jiwa, dengan usia produktif (15–59 tahun) mendominasi sebesar 63,62% dan kelompok anak-anak (0–14 tahun) sebesar 28,12% (Darmawan, 2024), sementara Indeks Pembangunan Manusia wilayah ini tercatat sebesar 73,25 pada tahun 2025, tertinggi di antara kabupaten/kota se-Sulawesi Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2026).

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Majene



Sumber : Kabupaten Majene dalam Angka, 2025

Pergeseran Otoritas Penutur: Perspektif Lintas-Wilayah Generasi Tua

Hasil wawancara mendalam dengan informan generasi tua di tiga subwilayah Kabupaten Majene memperlihatkan kecenderungan yang relatif seragam mengenai perubahan otoritas dalam komunikasi mitigasi bencana. Para informan menilai bahwa generasi muda kini lebih banyak merujuk pada informasi yang diperoleh melalui telepon seluler, media sosial, maupun notifikasi dari lembaga resmi dibandingkan pengetahuan yang diwariskan melalui tuturan lisan para tetua. Salah seorang tokoh adat di Malunda bahkan mengidentifikasi hadirnya telepon seluler dan internet sebagai momentum penting yang mengubah cara generasi muda menerima informasi, sehingga nasihat yang disampaikan secara lisan mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang kurang relevan atau dianggap “ketinggalan zaman”. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran posisi *Tomatua* sebagai *opinion leader* dalam sistem sosial lokal, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003), ketika otoritas penyampai informasi tradisional mulai digantikan oleh kanal komunikasi yang dianggap lebih modern. Fenomena serupa juga ditemukan pada sejumlah komunitas adat di Indonesia yang mengalami pelemahan peran penutur narasi lisan dalam proses transmisi pengetahuan kebencanaan (Fakhrudin & Elmada, 2022).

Kendati demikian, konsistensi pandangan yang disampaikan oleh ketiga informan generasi tua tidak serta-merta dapat diposisikan sebagai bukti tunggal mengenai terjadinya erosi transmisi pengetahuan. Keseragaman narasi tersebut juga perlu dipertimbangkan sebagai *rival hypothesis*, yaitu kemungkinan bahwa pernyataan tersebut merepresentasikan trope antargenerasi yang lazim muncul dalam berbagai konteks budaya, di mana generasi tua cenderung memandang generasi muda semakin menjauh dari nilai dan otoritas tradisional. Oleh karena itu, interpretasi terhadap temuan ini perlu ditempatkan secara hati-hati dengan membandingkannya terhadap perspektif generasi muda dan bentuk-bentuk praktik komunikasi yang berlangsung pada konteks sosial yang berbeda, sehingga dapat dibedakan antara persepsi antargenerasi dan perubahan nyata dalam proses transmisi pengetahuan mitigasi bencana.

Kekayaan Kosakata dan Sistem Makna Lokal atas Bencana

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Mandar memiliki sistem kosakata lokal yang kaya dalam memaknai berbagai fenomena kebencanaan. Gempa bumi dikenal melalui

istilah “*linor*”, selanjutnya terdapat istilah “*pappangang*” yang dipahami sebagai penyangga bumi yang bergerak akibat terganggunya keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, masyarakat juga mengenal istilah “*laut meluap*” dan “*lembo*” untuk menggambarkan gelombang pasang dan tsunami, serta mitos *balulu* yang merepresentasikan ular raksasa gaib sebagai penjelasan atas guncangan bumi yang sangat kuat. Ragam istilah tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kebencanaan dalam masyarakat Mandar tidak hanya hadir sebagai penamaan peristiwa alam, tetapi juga membentuk sistem makna yang menghubungkan gejala alam dengan nilai, kepercayaan, dan pengalaman kolektif masyarakat. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komunikasi mitigasi bencana gempa bumi di Majene dibangun melalui kearifan lokal yang memiliki fungsi komunikatif sekaligus edukatif (Rahmawati *et al.*, 2026).

Lebih jauh dalam sistem pengetahuan tersebut, terdapat juga istilah “*pappasang*” atau pesan leluhur yang menjadi medium utama dalam mewariskan pemahaman mengenai bencana kepada generasi berikutnya. Pesan-pesan ini disampaikan melalui narasi lisan yang mengandung petunjuk, larangan, maupun penjelasan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Dari perspektif *Narrative Paradigm* (Fisher, 1984), “*pappasang*” dapat dipahami sebagai bentuk *narrative rationality* yang memperoleh legitimasi melalui koherensi cerita (*narrative coherence*) dan kesesuaiannya dengan pengalaman hidup masyarakat (*narrative fidelity*). Dengan demikian, kekuatan *pappasang* tidak hanya terletak pada isi pesannya, tetapi juga pada kemampuannya membangun makna bersama yang diwariskan secara antargenerasi.

Yang menarik, penelitian ini juga menemukan adanya variasi tingkat keberlangsungan sistem makna lokal di setiap subwilayah. Istilah dasar seperti “*linor*” masih dikenal secara luas, termasuk oleh masyarakat di kawasan perkotaan Tanjung Batu, Majene. Akan tetapi, praktik budaya yang menyertainya, seperti ritual pembakaran sesaji, telah lama ditinggalkan dan mengalami pergeseran menuju praktik keagamaan berupa zikir serta doa “tolak bala” sebagai bentuk permohonan keselamatan. Sebaliknya, konstruksi makna yang lebih kompleks, seperti *pappangang*, *balulu*, dan *kapunungan*, masih relatif bertahan di wilayah Malunda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses transmisi pengetahuan lokal berlangsung dengan intensitas yang berbeda pada setiap sub-wilayah. Temuan tersebut selaras dengan berbagai penelitian mengenai komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal di Pangandaran, Tiworo, dan Maluku Barat Daya (Damayani *et al.*, 2022; Marhadi *et al.*, 2024; Pakniany *et al.*, 2022). Dalam perspektif transmisi budaya (Cavalli-Sforza *et al.*, 1982), kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Malunda masih memiliki kepadatan vektor transmisi oblik-tradisional yang lebih kuat, sehingga pengetahuan kebencanaan yang bersifat kompleks dan kontekstual lebih mampu dipertahankan dalam proses pewarisan antargenerasi.

Pelestarian Bentuk Ritual Tanpa Pelestarian Makna (Semantic Hollowing)

Salah satu temuan yang menonjol dalam penelitian ini berasal dari informan generasi muda di Malunda yang masih secara konsisten mengikuti ritual “*Topoparung*” serta mengenal pantangan yang diistilahkan dengan “*Kapunungan*”. Meskipun praktik tersebut tetap dijalankan, informan tidak lagi menafsirkannya sebagai konsekuensi supranatural atas pelanggaran terhadap alam. Sebaliknya, *Kapunungan* dipahami sebagai seperangkat norma yang mengajarkan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Pergeseran makna yang serupa juga tampak pada pengalaman informan ketika menghadapi gempa bumi tahun 2021. Keputusan untuk melakukan evakuasi ke daerah perbukitan didasarkan pada pesan adat yang diwariskan melalui ungkapan “*Linor keras, lari ke atas bukit*”, tetapi keputusan tersebut sekaligus dipertimbangkan melalui pengetahuan mengenai kondisi topografi, yaitu memilih lokasi yang

aman dari potensi tsunami dan tidak berada pada kawasan yang rawan longsor. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan adat dan penalaran empiris tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan saat bencana terjadi.

Jika ditinjau melalui perspektif *Narrative Paradigm* (Fisher, 1984), narasi kebencanaan berbasis adat pada kasus ini tidak mengalami penghapusan, tetapi mengalami proses reinterpretasi. Narasi leluhur tetap memiliki fungsi sebagai sumber identitas budaya dan pedoman sosial, sementara makna yang dilekatkan pada narasi tersebut disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman kontemporer. Dengan demikian, transformasi yang terjadi lebih mencerminkan perubahan pada cara narasi dimaknai daripada hilangnya narasi itu sendiri.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa erosi kearifan lokal di Majene tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai kondisi “bertahan” atau “hilang”. Keberadaan sebuah ritual belum tentu menunjukkan bahwa sistem pengetahuan dan makna yang melandasinya tetap utuh. Praktik budaya dapat terus berlangsung, tetapi fungsi, tujuan, dan interpretasinya mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial generasi penerus. Oleh karena itu, upaya revitalisasi komunikasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal tidak cukup mengukur keberlanjutan melalui keberadaan ritual semata, melainkan perlu memperhatikan dinamika perubahan makna yang menyertai proses transmisi pengetahuan antargenerasi.

Pergeseran Otoritas Informasi dan Perbandingan Lintas-Wilayah

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan adanya konsistensi pandangan di seluruh kelompok informan mengenai perubahan sumber otoritas informasi dalam komunikasi mitigasi bencana di Kabupaten Majene. Peran *Tomatua* dan orang tua yang sebelumnya menjadi rujukan utama dalam penyampaian pengetahuan kebencanaan kini mulai bergeser. Generasi muda lebih banyak memperoleh informasi melalui teman sebaya, media sosial, serta akun resmi lembaga seperti BMKG dan BPBD. Kesamaan pandangan antara informan generasi tua dan generasi muda mengindikasikan bahwa perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi telah menyentuh struktur sistem komunikasi dalam masyarakat. Dalam perspektif *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003), kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *replacement discontinuance*, yaitu ketika praktik atau kanal komunikasi yang telah lama mengakar digantikan oleh kanal baru yang dinilai lebih relevan dalam sistem sosial.

Perubahan pola otoritas informasi tersebut tidak hanya ditemukan pada masyarakat Mandar. Penelitian di Pangandaran juga menunjukkan kecenderungan bergesernya sumber informasi kebencanaan dari tokoh komunitas menuju kanal digital dan lembaga resmi setelah terjadinya bencana besar (Rizal et al., 2025). Kesamaan pola ini mengisyaratkan bahwa transformasi komunikasi kebencanaan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas daripada sekedar dinamika budaya lokal semata, yakni perubahan struktural dalam tata kelola komunikasi kebencanaan melalui digitalisasi informasi yang didorong secara nasional.

Meskipun demikian, perbandingan dengan komunitas Aceh memperlihatkan bahwa proses tersebut tidak berlangsung secara seragam di setiap daerah. Tinjauan sistematis mengenai kearifan lokal Aceh menunjukkan bahwa istilah “*Smong*” tidak mengalami pengikisan, tetapi justru berhasil diinstitusionalisasikan dan terus digunakan dalam ruang publik setelah tsunami 2004 (Fajri et al., 2024). Kondisi tersebut berbeda dengan temuan di Majene, di mana penggunaan sejumlah istilah lokal mengalami pelemahan setelah gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kearifan lokal pascabencana tidak semata-mata ditentukan oleh karakter budaya masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang dibangun oleh institusi pascabencana. Dengan kata lain, pilihan antara mendominankan komunikasi digital

atau mengintegrasikan istilah dan narasi lokal ke dalam komunikasi publik berpotensi menghasilkan lintasan transmisi pengetahuan yang berbeda terhadap generasi berikutnya.

Normalisasi dan Amplifikasi Risiko yang Tidak Proporsional

Dalam kehidupan masyarakat, persepsi terhadap risiko bencana tidak selalu berada pada tingkat yang sama. Ketika tidak terjadi bencana dalam kurun waktu yang panjang, perhatian terhadap ancaman cenderung menurun dan risiko dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika gempa kembali terjadi, termasuk pada guncangan dengan intensitas relatif kecil, kekhawatiran masyarakat dapat meningkat secara cepat. Salah seorang informan muda di Tanjung Batu mengaitkan kondisi tersebut dengan panjangnya periode tanpa bencana besar yang membuat masyarakat terbiasa berada dalam situasi aman dan nyaman. Dalam perspektif *Media System Dependency Theory* (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976), kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *attenuation*, ketika kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap informasi kebencanaan relatif rendah karena tidak adanya ancaman yang dirasakan secara langsung.

Pada situasi sebaliknya, gempa dengan skala kecil justru dapat memicu peningkatan kewaspadaan, terutama ketika masyarakat pada saat yang sama menerima informasi mengenai kejadian bencana di wilayah lain. Informan yang sama juga menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai potensi tsunami turut membentuk kekhawatiran masyarakat setelah terjadinya gempa. Fenomena tersebut dapat dibaca melalui *Social Amplification of Risk Framework* (Kasperson et al., 1988), ketika informasi yang beredar melalui media berperan sebagai *amplification station* yang memperkuat persepsi terhadap suatu ancaman. Dengan demikian, meningkatnya arus informasi melalui kanal digital tidak selalu berbanding lurus dengan terbentuknya persepsi risiko yang lebih akurat. Intensitas dan kecepatan penyebaran informasi dapat menghasilkan respons yang berbeda, bergantung pada konteks, pengalaman sebelumnya, serta cara masyarakat menafsirkan informasi yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi risiko tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga oleh kemampuan pesan dalam membangun pemahaman risiko yang proporsional dan kontekstual di tingkat masyarakat.

Hierarki Sumber Informasi Eksplisit dan Perbandingan Difusi Horizontal

Pilihan sumber informasi yang dipercaya oleh generasi muda memperlihatkan perubahan yang cukup jelas dalam pola penerimaan pesan kebencanaan. Sebagai contoh kasus, Seorang informan remaja di Sendana menempatkan aplikasi atau akun resmi BMKG sebagai sumber yang paling dipercaya, diikuti oleh grup WhatsApp keluarga dan sekolah, guru, berita televisi maupun media daring, sedangkan cerita serta petunjuk dari kakek atau tokoh adat berada pada posisi paling rendah. Kecenderungan yang lebih jauh terlihat pada informan remaja di Tanjung Batu yang menyatakan belum pernah mendengar istilah *Kapunungan* maupun *Balulu*. Jika dibaca melalui perspektif *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003), pilihan dan pengalaman kedua informan tersebut memberikan gambaran pada tingkat individual mengenai proses adopsi sumber informasi baru sekaligus menguatkan pandangan informan dewasa bahwa generasi remaja merupakan kelompok yang memiliki jarak paling besar dengan pengetahuan kebencanaan berbasis kearifan lokal.

Menariknya, posisi grup WhatsApp yang berada di atas guru dan media televisi dalam hierarki kepercayaan pada kasus informan di Sendana tersebut memberikan indikasi bahwa pergeseran sumber data tidak semata-mata mengarah dari sumber tradisional menuju sumber institusional. Meskipun temuan ini merupakan pernyataan individual yang belum dapat digeneralisasi sebagai pola umum generasi muda di Majene, data ini mendeskripsikan bahwa

proses difusi informasi juga berlangsung secara horizontal melalui jaringan pertemanan dan komunitas sebaya. Pola ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya menerima informasi dari lembaga resmi secara vertikal, tetapi juga melakukan pemilihan dan memaknai informasi melalui relasi sosial yang dekat dan relevan. Kecenderungan tersebut sejalan dengan kajian etnografi digital di Padang yang menunjukkan bahwa pengaruh akun resmi BMKG dalam komunikasi kebencanaan dapat berhadapan dengan kemampuan peran sumber informasi horizontal di kalangan pengguna muda (Carley et al., 2016). Dengan menyadari keterbatasan generalisasi data individual ini, fenomena di Sendana tetap penting diperhatikan dalam konteks Mandar, karena keberhasilan revitalisasi kearifan lokal tidak cukup dilakukan dengan memasukkan pengetahuan tradisional ke dalam platform, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi jaringan komunikasi sebaya sebagai ruang bagi proses transmisi dan reproduksi pengetahuan generasi muda.

Perspektif Kelembagaan BPBD: Konvergensi Sebagian dan Perbedaan Penekanan

Wawancara dengan staf teknis dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majene menunjukkan konvergensi mengenai keterbatasan anggaran dan personel yang mendorong pemanfaatan kanal digital seperti WhatsApp dan Facebook sejak gempa 2021, sebagai alternatif yang dianggap lebih efisien dibandingkan sosialisasi tatap muka ke desa-desa terpencil seperti Malunda. Namun, kedua jenjang informan menunjukkan perbedaan penekanan mengenai posisi pengetahuan lokal: pada tingkat staf teknis, pengetahuan lokal dipandang belum memiliki SOP maupun mekanisme dokumentasi formal, sementara pada tingkat pimpinan, respons refleksi masyarakat lokal yang segera menuju perbukitan begitu terjadi gempa kuat justru diapresiasi sebagai kearifan lokal yang membantu tugas BPBD mengurangi risiko korban jiwa. Dalam kerangka *Social Amplification of Risk Framework* (Kasperson et al., 1988), perbedaan pandangan ini di satu sisi dapat dipahami sebagai bentuk transformasi sinyal risiko yang berlangsung melalui dua “stasiun” berbeda dalam institusi yang sama. Namun, di sisi lain, diskrepansi ini tidak semata-mata menunjukkan pembagian peran yang harmonis, melainkan berpotensi mencerminkan adanya inkonsistensi kebijakan internal serta ambiguitas institusional di tubuh BPBD dalam memposisikan pengetahuan lokal. Ketidadaan dokumentasi formal dan SOP di tingkat teknis yang disertai dengan apresiasi lisan di tingkat pimpinan mengindikasikan bahwa kearifan lokal belum diadopsi secara struktural ke dalam arsitektur kebijakan mitigasi daerah, melainkan baru diakui sebagai respons instrumental yang bersifat situasional di lapangan.

Dari Tomatua ke Notifikasi BMKG: Anatomi Pergeseran Aktor, Kanal, dan Makna

Proses erosi kearifan lokal dalam mitigasi bencana di Majene berlangsung seiring dengan perubahan pada struktur komunikasi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu aktor, kanal, dan pesan. Pada dimensi aktor, otoritas “*Tomatua*” dan orang tua sebagai sumber pengetahuan tradisional mulai beralih kepada institusi formal, guru, teman sebaya, serta akun media sosial. Pada dimensi kanal, pola transmisi yang sebelumnya bertumpu pada komunikasi lisan antargenerasi semakin bergeser ke media digital yang memiliki jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi lebih tinggi, tetapi cenderung berlangsung secara satu arah. Sementara itu, pada dimensi pesan, perubahan tidak selalu ditandai oleh hilangnya istilah atau praktik budaya secara langsung. Sebagian pengetahuan justru tetap hadir dalam kehidupan masyarakat, tetapi mengalami perubahan fungsi dan pemaknaan, sebagaimana terlihat pada gejala *semantic hollowing* di Malunda.

Perubahan tersebut juga tidak berlangsung dengan intensitas yang sama pada setiap wilayah penelitian. Malunda menunjukkan keberlangsungan kosakata, ritual, dan pengetahuan

kebencanaan lokal yang relatif lebih kuat dibandingkan Sendana/Somba dan Tanjung Batu. Kondisi ini menunjukkan bahwa erosi kearifan lokal berlangsung secara selektif, bergantung pada konteks sosial dan kekuatan transmisi pengetahuan di masing-masing wilayah. Dengan demikian, persoalan utama tidak semata-mata terletak pada apakah suatu istilah, ritual, atau pengetahuan lokal masih ditemukan, tetapi juga pada sejauh mana generasi muda masih memahami dan memberikan makna yang serupa terhadapnya. Perbedaan antara keberadaan suatu pengetahuan atau praktik dengan makna yang dilekatkan generasi penerus inilah yang membentuk *meaning gap* dalam komunikasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal.

Menimbang Kearifan yang Tersisa: Titik Masuk bagi Revitalisasi

Salah satu unsur yang menunjukkan konsistensi paling kuat dalam keseluruhan data dalam penelitian ini adalah pengetahuan mengenai pola evakuasi berdasarkan kondisi topografi. Pola ini muncul dalam keterangan seluruh 13 informan dan memperoleh pengakuan secara langsung dari pimpinan BPBD. Meskipun demikian, keputusan untuk menuju wilayah yang lebih tinggi ketika terjadi gempa atau ancaman tsunami pada dasarnya merupakan respons yang bersifat rasional dan dapat ditemukan pada berbagai komunitas yang hidup di kawasan rawan bencana. Karena itu, perilaku tersebut belum cukup untuk disebut sebagai bentuk kearifan lokal Mandar yang memiliki kekhasan budaya. Kekhasan lokal justru lebih tampak pada sistem makna yang menyertai praktik tersebut, antara lain melalui istilah dan narasi *Linor*, *Pappangang*, *Kapunangan*, dan *Balulu*, praktik ritual *Topoparung* serta *Baca-Baca/Undung*, dan keberadaan struktur otoritas adat *Tomatua*.

Atas dasar kondisi tersebut, revitalisasi komunikasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal perlu diarahkan pada upaya menghubungkan kembali pengetahuan praktis dengan sistem makna budaya yang menjadi konteksnya. Langkah pertama dapat dilakukan dengan menjadikan pengetahuan mengenai evakuasi berbasis topografi sebagai pintu masuk, kemudian mengaitkannya kembali dengan istilah, narasi, dan pengalaman lokal masyarakat Mandar. Langkah kedua adalah mendokumentasikan istilah dan narasi kebencanaan tersebut ke dalam materi edukasi serta konten media sosial yang diproduksi oleh BPBD, sehingga pengetahuan lokal dapat hadir dalam kanal komunikasi yang lebih dekat dengan generasi muda. Langkah ketiga ialah memperkuat keterlibatan tokoh adat yang masih memiliki otoritas sosial, terutama *Tomatua* di Malunda, sebagai mitra komunikator dalam penyampaian pesan mitigasi berbasis komunitas. Pendekatan ini memungkinkan proses digitalisasi komunikasi kebencanaan tidak sekadar menggantikan kanal tradisional, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan dan memperluas jangkauan pengetahuan lokal.

Pembahasan Lintas-Teori: Difusi, Ketergantungan Media, dan Rasionalitas Naratif

Dalam kerangka *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003), perubahan pola komunikasi di Kabupaten Majene tidak berlangsung secara seragam, melainkan berkembang secara bertahap dengan kecepatan yang berbeda pada setiap sub-wilayah. Kondisi tersebut lebih tepat dipahami melalui konsep *replacement discontinuance*, yakni ketika masyarakat tidak hanya menerima kanal komunikasi baru, tetapi secara bersamaan mulai meninggalkan kanal lama yang sebelumnya telah menjadi bagian dari praktik komunikasi mereka. Dengan demikian, difusi dalam konteks ini berlangsung melalui dua proses yang berjalan beriringan: penerimaan terhadap teknologi dan sumber informasi baru serta berkurangnya penggunaan mekanisme transmisi pengetahuan tradisional. Malunda menunjukkan kecenderungan yang relatif lebih kuat dalam mempertahankan pola komunikasi lama karena keberadaan *opinion leader* tradisional, terutama *Tomatua*, masih memiliki legitimasi sosial. Sebaliknya, kelompok remaja memperlihatkan

penerimaan yang lebih cepat terhadap media digital, terutama karena informasi yang berbasis data dan sumber ilmiah dipandang selaras dengan pengetahuan yang mereka peroleh melalui pendidikan formal. Kecenderungan tersebut sejalan dengan penelitian Gadeng *et al.* (2024) terhadap 288 mahasiswa Generasi Z di Aceh yang menunjukkan bahwa hanya 17% responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi mengenai kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Hal ini menempatkan perubahan yang terjadi pada generasi muda Mandar dalam konteks yang lebih luas, yaitu semakin kuatnya posisi sumber informasi modern dalam pembentukan pengetahuan kebencanaan generasi muda di Indonesia.

Perubahan sumber informasi tersebut selanjutnya dapat dipahami melalui *Media System Dependency Theory* (Ball-Rokeach & DeFleur, 1976). Penguatan kanal digital BPBD Majene setelah gempa 2021 dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi institusi terhadap perubahan kebutuhan informasi masyarakat dalam situasi pascabencana. Ketidakpastian yang muncul setelah bencana meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan dianggap kredibel, sehingga media formal memperoleh posisi yang semakin penting. Namun, meningkatnya ketergantungan terhadap kanal digital juga memiliki konsekuensi terhadap keberadaan sumber informasi lokal. Apabila digitalisasi hanya diarahkan untuk memperkuat kanal resmi tanpa mempertahankan komunikasi melalui tokoh adat dan jaringan komunitas, proses tersebut dapat mengarah pada *displacement*, yaitu tergesernya sumber pengetahuan lama oleh sumber baru. Temuan ini relevan dengan penelitian Hesti *et al.* (2025) terhadap 238 responden Generasi Y dan Z di Jawa yang menunjukkan bahwa paparan konten kebencanaan melalui media digital berpengaruh terhadap persepsi risiko, tetapi tidak secara langsung meningkatkan perilaku kesiapsiagaan. Pengaruh tersebut berlangsung melalui persepsi risiko sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, banyaknya informasi yang diterima melalui media digital belum tentu menghasilkan kesiapan menghadapi bencana. Dalam konteks Majene, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi komunikasi kebencanaan perlu diarahkan sebagai sarana pelengkap yang memperkuat, bukan menggantikan, sumber pengetahuan yang telah hidup dalam komunitas.

Perubahan pada kanal komunikasi kemudian berhubungan dengan perubahan cara generasi berbeda dalam menilai kebenaran dan relevansi pesan mitigasi. Perspektif *Narrative Paradigm* (Fisher, 1984) menunjukkan bahwa generasi tua masih mengandalkan bentuk komunikasi naratif, seperti *Pappasang* dan mitos *Balulu*, untuk menyampaikan pengetahuan mengenai bencana. Sebaliknya, kelompok remaja cenderung memberikan legitimasi lebih besar kepada informasi yang bersumber dari data dan pengukuran ilmiah, termasuk informasi yang disampaikan melalui sistem pemantauan BMKG. Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan pergeseran dari *narrative rationality* menuju pola penalaran yang lebih dekat dengan *rational-world paradigm*. Akan tetapi, pergeseran tersebut tidak sepenuhnya berarti bahwa rasionalitas naratif telah ditinggalkan. Kasus *semantic hollowing* di Malunda justru memperlihatkan bahwa narasi adat masih dapat bertahan sebagai bagian dari identitas dan praktik sosial, sementara pertimbangan empiris digunakan ketika masyarakat mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.

Kemungkinan berlangsungnya kedua bentuk rasionalitas secara berdampingan juga dapat dilihat pada komunitas lain di Indonesia. Fauzan & Aziz (2020), misalnya, menemukan bahwa mitos Telaga Lindur pada masyarakat Lombok Utara masih digunakan sebagai media penyampaian peringatan dan pedoman perilaku mitigasi meskipun substansi mitologisnya tidak dapat dibuktikan melalui pengetahuan ilmiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *narrative rationality* tidak selalu harus diposisikan sebagai bentuk pengetahuan lama yang secara otomatis akan tersingkir ketika

pengetahuan ilmiah berkembang. Narasi lokal masih dapat memiliki fungsi komunikasi selama terdapat penutur, ruang interaksi, dan mekanisme sosial yang memungkinkan narasi tersebut terus diwariskan dan diberi makna. Oleh karena itu, persoalan utama dalam konteks Majene bukan mempertahankan kearifan lokal dalam bentuk yang sepenuhnya sama dengan masa lalu, melainkan menjaga agar unsur-unsur pengetahuan tersebut tetap relevan bagi generasi muda dan dapat dipertautkan dengan pengetahuan ilmiah dalam praktik mitigasi bencana. Dengan pendekatan demikian, transformasi digital tidak harus berakhir pada penghapusan sistem komunikasi lokal, tetapi dapat diarahkan menjadi ruang baru untuk memperpanjang keberlangsungan dan jangkauan kearifan lokal Mandar.

Kontestasi Pengetahuan dan Relasi Kuasa: Membaca Erosi sebagai Persoalan Legitimasi Komunikasi

Di samping empat perspektif komunikasi yang digunakan sebagai kerangka analisis fungsional, temuan penelitian ini juga perlu dipahami melalui perspektif komunikasi kritis yang menyoroti relasi kuasa dalam produksi dan legitimasi pengetahuan. Pergeseran otoritas informasi dari *Tomatua* menuju BMKG dan BPBD tidak hanya mencerminkan perubahan saluran komunikasi, tetapi juga menunjukkan perubahan mengenai jenis pengetahuan yang memperoleh pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan mitigasi bencana. Dalam konteks ini, perubahan kanal komunikasi sekaligus menjadi perubahan otoritas epistemik, yaitu pergeseran dari pengetahuan yang diwariskan melalui tradisi lisan menuju pengetahuan yang dilegitimasi oleh institusi formal.

Indikasi tersebut tampak pada pernyataan salah seorang staf teknis BPBD yang menyebutkan bahwa pengetahuan lokal belum memiliki standar operasional maupun mekanisme dokumentasi formal. Pernyataan ini merefleksikan logika birokrasi yang menempatkan pengetahuan yang terdokumentasi, terstandardisasi, dan berbasis prosedur sebagai bentuk pengetahuan yang sah dalam sistem kelembagaan. Sebaliknya, pengetahuan kebencanaan masyarakat Mandar yang ditransmisikan melalui narasi lisan, simbol budaya, dan pengalaman kolektif belum memperoleh posisi yang setara dalam sistem komunikasi kebencanaan formal. Dari perspektif komunikasi kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi risiko selalu berkaitan dengan proses seleksi dan legitimasi pengetahuan. Institusi tidak hanya menentukan bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga menentukan pengetahuan mana yang memperoleh validitas publik dan mana yang cenderung ditempatkan sebagai pengetahuan pendukung. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pengetahuan lokal, seperti pola evakuasi berbasis topografi yang dikonfirmasi oleh seluruh informan, tetap memiliki fungsi praktis yang terbukti efektif dalam mendukung keselamatan masyarakat saat bencana.

Selanjutnya, relasi kuasa juga terlihat pada tingkat generasi melalui perubahan hierarki sumber informasi yang dipercaya. Informan remaja secara eksplisit menempatkan BMKG sebagai sumber informasi utama, diikuti grup WhatsApp, guru, media massa, dan baru kemudian tokoh adat. Urutan tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar perpindahan media komunikasi, tetapi juga proses negosiasi ulang mengenai siapa yang dianggap memiliki otoritas untuk mendefinisikan risiko dan menyampaikan kebenaran mengenai bencana. Dengan kata lain, generasi muda membangun legitimasi pengetahuan berdasarkan kredibilitas sumber yang mereka anggap paling dapat dipercaya dalam konteks komunikasi digital.

Fenomena tersebut berkaitan dengan persoalan *digital divide* dalam komunikasi risiko. Penguatan kanal digital sebagai sumber informasi resmi tidak selalu diikuti oleh distribusi akses dan literasi digital yang merata di setiap wilayah maupun kelompok usia. Akibatnya, dominasi komunikasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara kelompok yang memiliki

kemampuan mengakses dan memverifikasi informasi digital dengan kelompok yang masih mengandalkan komunikasi lisan dalam komunitas. Kecenderungan ini sejalan dengan penelitian Gadeng et al. (2024) yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan generasi muda terhadap kearifan lokal mitigasi bencana, serta penelitian Hesti et al. (2025) yang menemukan bahwa paparan informasi digital mampu membentuk persepsi risiko, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan perilaku kesiapsiagaan.

Berdasarkan temuan tersebut, revitalisasi komunikasi mitigasi berbasis kearifan lokal tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai agenda pelestarian budaya. Revitalisasi juga merupakan upaya membangun kembali keseimbangan otoritas epistemik dalam ekosistem komunikasi risiko, sehingga pengetahuan lokal tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diakui sebagai sumber pengetahuan yang memiliki nilai praktis dan legitimasi dalam komunikasi mitigasi bencana. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah-institusional untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan, dalam membangun sistem komunikasi kebencanaan yang lebih kontekstual dan inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa erosi kearifan lokal dalam komunikasi mitigasi bencana pada generasi muda Mandar di Kabupaten Majene merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada sistem komunikasi budaya. Perubahan tersebut berlangsung melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu bergesernya otoritas sumber pengetahuan dari *Tomatua* dan orang tua kepada institusi formal serta media digital, berubahnya mekanisme transmisi dari komunikasi lisan antargenerasi menuju kanal digital, dan bergesernya pemaknaan terhadap pesan mitigasi yang diwariskan dalam tradisi lokal. Pada dimensi terakhir, erosi tidak selalu ditandai oleh hilangnya praktik atau istilah adat, tetapi muncul dalam bentuk *semantic hollowing*, yaitu ketika ritual dan kosakata lokal masih dipertahankan, namun makna yang dilekatkan oleh generasi muda mengalami reinterpretasi sesuai konteks sosial dan pengetahuan kontemporer.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa proses erosi berlangsung secara selektif dan berbeda pada setiap subwilayah. Malunda menjadi wilayah yang relatif lebih mampu mempertahankan kosakata lokal, ritual, dan struktur pengetahuan kebencanaan dibandingkan Sendana/Somba maupun Tanjung Batu. Di antara berbagai unsur kearifan lokal yang ditemukan, pengetahuan mengenai evakuasi berbasis topografi merupakan elemen yang memiliki daya transmisi paling kuat karena diakui secara konsisten oleh seluruh informan. Namun, kekhasan kearifan lokal Mandar tidak terletak pada praktik evakuasi itu sendiri, melainkan pada sistem makna yang menopangnya, seperti istilah *Linor*, *Pappangang*, *Kapunangan*, dan *Balulu*, praktik ritual *Topoparung* dan *Baca-Baca/Undung*, serta otoritas adat *Tomatua* sebagai penutur dan penjaga pengetahuan antargenerasi.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi risiko dan komunikasi antargenerasi dalam Ilmu Komunikasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa erosi kearifan lokal lebih tepat dipahami sebagai disrupsi terhadap sistem komunikasi budaya yang memengaruhi proses transmisi, reproduksi, dan legitimasi pengetahuan, sekaligus mencerminkan kontestasi otoritas antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah-institusional. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga dengan posisi pengetahuan lokal dalam ekosistem komunikasi risiko yang terus berubah.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga arah revitalisasi komunikasi mitigasi berbasis kearifan lokal yang saling melengkapi bagi BPBD Kabupaten Majene dan

pemangku kepentingan terkait. Pertama, menjadikan pengetahuan evakuasi berbasis topografi sebagai pintu masuk komunikasi mitigasi yang kemudian dihubungkan kembali dengan istilah, narasi, dan sistem makna lokal masyarakat Mandar. Kedua, melakukan dokumentasi dan pelebagaan istilah serta narasi kebencanaan lokal ke dalam materi komunikasi, media edukasi, dan konten media sosial resmi BPBD, sekaligus mengakomodasinya dalam standar operasional prosedur kebencanaan agar pengetahuan lokal memperoleh pengakuan formal yang setara dengan pengetahuan ilmiah-institusional. Ketiga, memperkuat keterlibatan *Tomatua* dan tokoh adat yang masih aktif, khususnya di Malunda, sebagai mitra komunikator dalam penyelenggaraan komunikasi mitigasi berbasis komunitas sehingga proses digitalisasi berjalan secara komplementer dengan mekanisme komunikasi lokal yang telah hidup dalam masyarakat.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diperlukan cakupan informan yang lebih luas dengan pendekatan kuantitatif agar tingkat pengetahuan kearifan lokal pada generasi muda dapat diukur secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan dan pengujian model komunikasi mitigasi yang mengintegrasikan *narrative rationality* dan *rational-world paradigm*, sehingga pesan mitigasi mampu mempertahankan relevansi budaya sekaligus memenuhi kebutuhan komunikasi risiko di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sulawesi Barat atas dukungan administratif dan fasilitasi penelitian, kepada seluruh informan di tiga sub-wilayah Kabupaten Majene (Sendana/Somba, Tanjung Batu, dan Malunda) atas kesediaan berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene atas kesediaan dan waktu yang diberikan selama proses wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021a). *Laporan dampak gempa Sulawesi Barat 2021*.
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021b). *Total kerusakan dan kerugian pascagempa M6,2 Sulbar capai Rp829,1 miliar*. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/total-kerusakan-dan-kerugian-pascagempa-m6-2-sulbar-capai-rp829-1-miliar>
 Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2026). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2025*.
<https://sulbar.bps.go.id/id/publication/2026/04/24/9e429cd3c86e1f87107393c1/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-sulawesi-barat-2025.html>
 Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. *Communication Research*, 3(1), 3. <https://doi.org/10.1177/009365027600300101>
 Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
 Carley, K. M., Malik, M., Landwehr, P. M., Pfeffer, J., & Kowalchuck, M. (2016). Crowd sourcing disaster management: The complex nature of Twitter usage in Padang Indonesia. *Safety Science*, 90, 48–61. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.04.002>
 Cavalli-Sforza, L. L., Feldman, M. W., Chen, K. H., & Dornbusch, S. M. (1982). Theory and observation in cultural transmission. *Science*, 218(4567), 19–27. <https://doi.org/10.1126/science.7123211>
 Damayani, N. A., Saepudin, E., Rusmana, A., Rizal, E., & McArthur, J. M. B. (2022). The local wisdom-based disaster mitigation literacy of the indigenous Pangandaran community. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(2), 424–439. <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i2.4862>

- Fajri, I., Khairul, M., Adawiyah, R., & Shirotriya, A. K. (2024). Local wisdom of the Aceh community in nature conservation and disaster mitigation: A systematic review. *Education, Environmental and Society Research*, 1(1), 1–7.
- Fakhruddin, I., & Elmada, M. A. G. (2022). Local wisdom as a part of disaster communication: a study on the local storytelling in disaster mitigation. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 154–166. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.22145>
- Fauzan, A., & Aziz, L. A. (2020). Kearifan lokal tentang mitigasi bencana di Kabupaten Lombok Utara dalam mitos Telaga Lindur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 184–195. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.29941>
- Fisher, W. R. (1984). Narration as a human communication paradigm: The case of public moral argument. *Communication Monographs*, 51(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/03637758409390180>
- Gadeng, A. N., Desfandi, M., Ridha, S., Ruliani, R., & Shafida, M. (2024). The knowledge levels of Generation Z toward local wisdom of Aceh community for disaster mitigation. *International Journal of Disaster Management*, 7(2), 129–142. <https://doi.org/10.24815/ijdm.v7i2.37242>
- Hesti, S., Shevaura, C., & Dwityas, N. A. (2025). Digital media, risk perception, and earthquake preparedness among Indonesian urban youth. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 17(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1939>
- Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X., & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. *Risk Analysis*, 8(2), 177–187. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x>
- Marhadi, A., Ino, L., Suraya, R. S., Janu, L., Said, T., & Gaho, R. (2024). Understanding local wisdom as specific knowledge in natural disaster mitigation: An empirical lessons in Tiworo, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(4), 1383–1392. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.4.31>
- Pakniyany, Y., Tiwery, W. Y., & Rakuasa, H. (2022). Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berbasis Kearifan Lokal di Desa Nuwewang Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 20–29. <https://doi.org/10.33477/dj.v15i1.3155>
- Pemerintah Kabupaten Majene. (n.d.). *Profil Majene*. Humas Kabupaten Majene. <https://humas.majenekab.go.id/profil-majene/>
- Rahmawati, R., Nuraliah, D., & Mussadad. (2026). Optimization of mitigation communication in addressing earthquake threats in Majene Regency: Local wisdom based approach. *JURKOM*, 9(1), 55–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.38194/jurkom.v9i1.1498>
- Rizal, E., Winoto, Y., Sugito, T., Nugroho, C., & Septian, F. I. (2025). Disaster communication in the digital age: a community-based case study of media, education, and local knowledge in Pangandaran, Indonesia. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632436>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.